

**PENGARUH DANA DESA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KABUPATEN DI PULAU JAWA, BALI, NUSA TENGGARA
BARAT, DAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015-2018**

RINGKASAN SKRIPSI



**FREDRIK SY
3118 30528**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
AGUSTUS 2020**

SKRIPSI

**PENGARUH DANA DESA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN DI PULAU JAWA, BALI,
NUSA TENGGARA BARAT, DAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015-2018**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

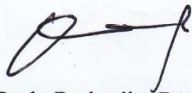
FREDRIK SY

No Induk Mahasiswa: 311830528

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 14 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji

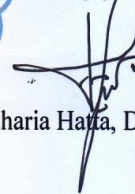
Pembimbing



Rudy Badrudin, Dr, M.Si



Penguji



Atika Jauharia Hafza, Dr, M.Si, Ak.

Yogyakarta, 14 Agustus 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN DI PULAU JAWA, BALI, NUSA TENGGARA BARAT, DAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015-2018

Fredrik Sy
3118 30528

Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana desa dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah dana desa dan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan jumlah dana desa dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Variabel dependen pada penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria tersedianya data dana desa, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah dipublikasi pada situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Sampel penelitian berdasar kabupaten di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur tahun 2015 sampai 2018. Penelitian ini menggunakan regresi berganda sebagai alat analisis ($\alpha = 0,05$). Berdasar hasil pengujian hipotesis pertama dan kedua, dana desa dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : Dana Desa, Pertumbuhan ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Demi menciptakan tingkat kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pada tahun 2014 tentang desa melalui UU no 6 tahun 2014. Peraturan mengenai pemberian perintah kepada pemerintah agar mendistribusikan dana anggaran ke desa tertuang pada peraturan tersebut. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk melihat potensi daerahnya, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakat daerahnya (Badrudin dan Siregar, 2015). Kebijakan dana desa demi terwujudnya desa kuat, demokratis, maju, dan mandiri, sehingga seluruh potensi desa harus diberdayakan (Jamaluddin, Sudaryana, Rusli, dan Buchari, 2018). Pemerintah berharap program dana desa dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberi peran kepada pemerintahan daerah agar maksimalnya potensi yang ada di daerahnya.

Aspek penting terlaksananya program dana desa yaitu pendistribusian dana pemerintah pusat ke pemerintah desa, tetapi pendistribusian anggaran

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

membutuhkan peran dari pemerintah kabupaten sesuai dengan proporsi kewenangannya. Demi terlaksananya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran dana desa tersebut maka dibutuhkan persyaratan yang harus terpenuhi terlebih dahulu oleh pihak yang terkait yakni pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Peraturan tersebut tertuang dalam PMK nomor 112/PMK.07/2017. Pendistribusian dana desa dibagi menjadi 2 tahapan penyaluran dana dengan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, baik syarat laporan keuangan maupun bukti output hasil capaian.

Memahami peraturan mengenai dana desa, dapat disimpulkan pemerintah desa didorong untuk dapat mengelola seluruh anggaran secara efektif dan transparan. Efektif maksudnya adalah pemanfaatan dana desa dapat mencapai target kualitas, kuantitas dan waktu sesuai aturan. Transparan maksudnya adalah penggunaan dana desa dapat dipertanggung jawabkan keberhasilan ataupun kegagalannya dalam pemanfaatannya. Mengelola dana desa secara efektif dan transparan tentunya membutuhkan kinerja pengelolaan keuangan yang memadai dalam pengelolaannya.

Pemanfaatan dana desa pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah desa, sehingga penggunaan anggaran bergantung kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Kinerja keuangan suatu daerah yang belum maksimal mengakibatkan kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan (Putry dan Badrudin, 2017). Semakin tinggi dana desa yang diberikan maka akan terjadi peningkatan pembangunan desa (Rimawan dan Aryani, 2019). Berdasar hal tersebut maka memiliki arti dana desa dapat terealisasi dengan baik bila pemerintah daerah dapat mengelola anggaran dengan efisien dan efektif sehingga dana desa meningkatkan pembangunan desa untuk mensejahterakan masyarakat.

Usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi bertujuan meningkatkan jenis dan jumlah peluang kerja dalam usaha mensejahterakan masyarakat (Kusreni, 2009). Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan produksi jasa dan barang milik masyarakat, dengan arti semakin tinggi jasa dan barang yang dihasilkan masyarakat maka masyarakat akan sejahtera.

Pertumbuhan ekonomi mengartikan peningkatan pendapatan nasional terlepas dari terdapat atau tidaknya perubahan dalam struktur ekonomi (Badrudin dan Siregar, 2015). PDRB merupakan jumlah nilai dari jasa dan barang yang diproduksi dari semua unit usaha dalam suatu daerah (BPS, 2019). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ialah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi.

Membentuk suatu pemerintahan yang mensejahterakan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari terbentuknya Negara Indonesia yang terkandung dalam UUD 1945. Pemberian dana desa dan peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan dalam mensejahterakan masyarakat dapat dilihat tingkat kualitasnya atau mutu SDM menggunakan indikator yang telah dihitung menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah tolok ukur capaian kesejahteraan masyarakat dinilai berdasarkan komponen dimensi dasar kualitas hidup yaitu usia panjang, tingkat pendidikan, dan kelayakan hidup (BPS, 2019). IPM mampu menjadi indikator keberhasilan suatu wilayah mensejahterakan masyarakatnya dan dapat menjadi alat ukur tingkat kinerja pemerintah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TINJAUAN TEORI

Teori Agensi

Teori agensi ialah suatu teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara prinsipal dan agen. Jensen dan Meckling (1976), menyebutkan tentang hubungan agensi dengan pengertian bahwa ikatan keagenan merupakan kontrak dalam bentuk pelimpahan kewenangan membuat keputusan yang diamanahkan oleh prinsipal kepada agen. Hubungan menyebabkan agen berkewajiban mempertanggungjawabkan kewenangan yang diamanahkan oleh prinsipal. Hak dan tanggungjawab prinsipal dan agen ditentukan dalam bentuk kontrak kerja yang disetujui kedua pihak.

Teori agensi bertujuan membentuk kontrak kerja yang tepat agar tidak terjadi konflik antara prinsipal dan agen. Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan bahwa ada dua konflik potensial yang dapat terjadi, yaitu prinsipal sebagai pihak pemberi kerja dan agen pihak yang diberi kerja. Kontrak kerja dibentuk agar memperkecil kemungkinan konflik dengan cara menjelaskan hak dan kewajiban prinsipal dan agen.

Berdasar teori agensi, hubungan rakyat pada pemerintah dapat diartikan sebagai hubungan keagenan, yaitu ikatan yang terjadi karena terjadi kontrak antara rakyat (prinsipal) yang menggunakan pemerintah (agen) untuk melaksanakan tugas demi kepentingan rakyat (Jensen dan Meckling, 1976). Pemerintah diawasi rakyat demi sesuainya tujuan pemerintah dengan tujuan rakyat yaitu kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diwajibkan rakyat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang diamanahkan dalam bentuk pelaporan keuangan secara periodik (Badrudin dan Siregar, 2015).

Hubungan keagenan menimbulkan resiko adanya konflik keagenan. Konflik dapat terjadi apabila agen memiliki informasi lebih banyak dari pada prinsipal. Agen memiliki informasi lebih banyak dari prinsipal berpotensi menyalahgunakan kewenangan, sehingga dibutuhkan biaya agensi dalam pelaksanaan dan pengawasan hubungan keagenan agar tidak terjadi konflik keagenan. Berkaitan dengan program dana desa, biaya keagenan muncul pada biaya untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Laporan keuangan periodik dipergunakan demi 2 tujuan. Tujuan pertama, untuk pertimbangan keputusan agen dan prinsipal. Tujuan kedua, untuk dapat menilai kontrak kerja yang telah disepakati. Laporan keuangan keuangan dapat menjadi alat tolok ukur keberhasilan agen sekaligus alat memotivasi agen agar bekerja optimal.

Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal merupakan teori yang menjelaskan penyerahan tanggungjawab dan kewenangan dari pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat lebih rendah. Desentralisasi fiskal merupakan suatu metode demi mendukung tugas dan peran pemerintah untuk pelayanan publik sesuai dengan tingkat kewenangan yang didelegasikan (Siregar dan Badrudin, 2019). Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pengalihan tanggungjawab dan kewenangan ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Kewenangan yang dilimpahkan bertujuan demi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mempercepat terlaksananya program kerja pemerintah, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi fiskal di Indonesia mengacu pada UU nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Peraturan tersebut diartikan pemerintah daerah diberikan hak pengelolaan daerah secara lebih mandiri. Desentralisasi bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat dengan memposisikan pembuat kebijakan lebih dekat dengan masyarakat (Putra, 2018). Pemerintah daerah memiliki posisi paling dekat dengan daerah yang dikelolanya sehingga pemerintah daerah lebih dianggap mengerti karakteristik daerah tersebut sehingga diharapkan dapat melakukan fungsi pemerintahan lebih efektif dan efisien.

Prinsip *money should follow function* menjadi prinsip yang perlu diawasi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, artinya dalam penyerahan kewenangan pemerintah mempunyai akibat pada anggaran yang diperlukan saat pelimpahan wewenang tersebut. Semakin banyak kewenangan yang diberikan, maka akan semakin besarnya pula biaya yang dibutuhkan suatu daerah. Pengelolaan anggaran yang diberikan tersebut membutuhkan kebijakan yang tepat agar dana anggaran dipergunakan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi belanja daerah berperan penting dalam meningkatkan penerimaan daerah (Manek dan Badrudin, 2016). Pemerintah daerah berperan penting dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan ekonomi daerah sehingga kinerja pemerintah daerah memegang pengaruh penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal maka pemerintah daerah dapat melakukan fungsi alokasi secara mandiri dan menggali pendapatan sehingga mampu menetapkan prioritas pembangunan (Manek dan Badrudin, 2016).

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan tingkat jasa dan barang yang dihasilkan pada suatu kegiatan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi bermakna lebih luas yaitu perubahan tatanan ekonomi masyarakat pada kerangka susunan ekonomi dan pada kerangka ekonomi masyarakat.

Teori pembangunan ekonomi menurut Harrod-Domar, semakin tingginya tingkat rasio tabungan, upah, dan investasi maka semakin meningkat pula tingkat pertumbuhan (Badrudin, 2017:134). Begitu pula sebaliknya, jika semakin rendah tingkat rasio tabungan, upah, dan investasi maka semakin menurun pula tingkat pertumbuhan.

Teori pembangunan ekonomi menurut Nicholas Kaldor menjelaskan bahwa masyarakat memiliki dua kelompok yaitu buruh dan kapitalis, dan dari kedua kelompok memiliki kecenderungan menabung yang berbeda. Menurut Djojohadikusumo (1994:49), teori pembangunan ekonomi dari Nicholas Kaldor adalah perpaduan yang bersifat interaksi antara metode induksi (empiris-rasioal) dan deduksi (rasional-empiris). Pada metode induksi dimulai dari data empiris yang sudah ada, tetapi belum adanya masalah tertentu. Pada metode deduksi dimulai dari adanya permasalahan tertentu, kemudian dikaji teori atau dasar rasionalnya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dana Desa

Menurut PMK nomor 49 tahun 2016, dana desa adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan bagi masyarakat desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota lalu digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan, membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan masyarakat. Dana desa diutamakan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang pelaksanaannya diutamakan menggunakan sumber daya lokal, agar produk lokal dan tenaga kerja lokal dapat terserap. Dana desa memiliki dapat digunakan demi meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan, pengembangan usaha, dan pengembangan wisata.

Hasil pelaksanaan dana desa dalam 4 tahun (2015-2018), telah dirasakan oleh masyarakat terutama dengan telah dibangunnya 1.140,4 km jembatan desa, 9.000 unit pasar desa, 191.600 km jalan desa, 4.175 unit embung desa, 24.800 unit posyandu, 240.600 unit sarana MCK, 9.692 unit polindes, 50.900 unit paud, 959.600 unit sarana air bersih dan 29.500.000 unit drainase (Kemenkeu, 2019). Dana desa adalah pembaharuan kebijakan dari kebijakan sebelumnya demi mensejahterakan masyarakat (Jamaluddin, Sumaryana, Rusli, dan Buchari, 2018). Pembaharuan kebijakan diperlukan agar kebijakan tetap relevan dengan keadaan sekarang demi mensejahterakan masyarakat. Berdasar permaparan tersebut maka sudah jelas program dana desa upayakan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2006:19), pertumbuhan ekonomi merupakan usaha demi meningkatkan tingkat produksi suatu perekonomian secara berkesinambungan untuk meningkatkan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan produk nasional dan pendapatan perkapita (Yasa dan Arka, 2015). Pertumbuhan ekonomi erat hubungannya dengan indikator ekonomi makro, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menjadi gambaran awal dari kondisi ekonomi suatu daerah.

PDRB menjadi tolok ukur dari keberhasilan suatu daerah meningkatkan serta menggali potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah menggambarkan semakin besar peningkatan aktifitas ekonomi suatu daerah. PDRB adalah jumlah nilai jasa dan barang yang diproduksi dari semua unit usaha dalam suatu daerah. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil, sehingga melihat pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi faktor harga. PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari dari tiap periode. Hasil perhitungan PDRB digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara makro. Berikut cara menghitung pertumbuhan ekonomi dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

PDRB = Produk domestik regional bruto tahun terkait

PDRB = Produk domestik regional bruto tahun sebelumnya

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasar rumus tersebut, maka dalam menghitung pertumbuhan ekonomi membutuhkan nilai dari PDRB tahun yang akan dihitung dan PDRB tahun sebelumnya sebagai dasar perhitungan. Misal saat menghitung pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2018, diperlukan PDRB tahun 2018 dan PDRB tahun 2016. Setelah mengetahui PDRB tahun dihitung dan tahun dasar maka pertumbuhan ekonomi dihitung dengan PDRB 2018 dikurangi PDRB 2016 kemudian dibagi dengan PDRB 2016 lalu dikalikan 100%. PDRB dapat memberi gambaran tentang nilai tambah bruto yang dihasilkan daerah dalam periode tertentu (Manek dan Badrudin, 2016).

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan yang dapat dicapai bila masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan. Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006:22) tolok ukur berhasilnya usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi:

1. Pemerataan dan peningkatan distribusi kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan dan papan.
2. Meningkatnya tingkat kehidupan seperti tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan pilihan hidup.
3. Meningkatnya kemakmuran ekonomi dalam kehidupan individu dan masyarakat.

Berdasar pemaparan tersebut maka kesejahteraan masyarakat mampu dicapai dengan melakukan pembangunan pada manusia. Kesejahteraan masyarakat dicapai apabila masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Kebutuhan dasar kehidupan tersebut ditempatkan sejajar sehingga tidak ada aspek yang lebih penting dari aspek lainnya.

Tahun 2015, pembangunan pada tingkatan global mengacu pada *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep SDGs berkaitan dengan isu yang berpengaruh secara global, seperti SDA, SDM, kerusakan lingkungan, ketahanan pangan, energi, perubahan iklim, dan perlindungan sosial. SDGs dibentuk atas tiga pilar antara lain:

1. Kategori pembangunan manusia, seperti kesehatan dan pendidikan.
2. Kategori lingkungan kecil, seperti lingkungan hidup yang layak.
3. Kategori lingkungan besar, seperti ketersediaan sumber daya yang berpengaruh dalam kehidupan.

IPM menjadi indikator tolok ukur perubahan kualitas hidup masyarakat disusun dari tiga dimensi dasar, yaitu standar hidup layak, usia hidup, dan pengetahuan (BPS, 2019). IPM merupakan indikator guna mengukur kemajuan pembangunan jangka panjang untuk melihat keberhasilan dan kualitas kehidupan manusia (Rimawan dan Aryani, 2019). Menghitung IPM digunakan menggunakan rumus:

$$IPM = \frac{1}{3} (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

Keterangan:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

x_1 : angka harapan hidup
 x_2 : tingkat pendidikan
 x_3 : standar hidup layak

Pengembangan Hipotesis

Berdasar tinjauan teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini terdapat dua hipotesis sebagai berikut:

Pengaruh Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pengadaan dana desa digunakan pemerintah daerah sebagai tolok ukur dalam terwujudnya pembiayaan kegiatan pelaksanaan, pembangunan, pemberdayaan dan kepentingan dalam lingkup masyarakat desa. Dana desa dipergunakan dalam membiayai pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada penelitian Manggala (2019), menjelaskan bahwa dana desa berpengaruh positif terhadap IPM. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kenaikan pada dana desa 1% maka menyebabkan kenaikan IPM pada setiap kabupaten/kota sebesar 0,695105%. Hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dana desa dapat berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Rimawan dan Aryani (2019), menjelaskan mengenai alokasi dana desa berpengaruh positif pada IPM. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian tersebut menjelaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat meningkat seiring peningkatan sarana pendidikan, infrastruktur, dan layanan kesehatan yang ada di desa. Pemaparan tersebut sesuai dengan teori menurut Yasa dan Arka (2015) yang menjelaskan setiap kebijakan yang mendukung pembangunan memiliki tujuan dasar yaitu mensejahterakan masyarakat.

Penelitian lain yang ikut mendukung hipotesis peneliti yaitu Sunu dan Utama (2019), yang memiliki hasil sama dalam penelitiannya yaitu dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut penelitian tersebut semakin tinggi dana desa yang diberikan maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat.

H1: Dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2018.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan usaha meningkatkan produksi jasa dan produk dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan upaya peningkatan ekonomi ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi diupayakan untuk menyediakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan, dan mengurangi kemiskinan (Baeti, 2013). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tinggi dan berkelanjutan mengindikasikan kemajuan daerah, sehingga dengan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Pada penelitian Baeti (2013), menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap 1% penambahan tingkat pertumbuhan ekonomi maka IPM di Jawa Tengah akan bertambah sebesar 0,14%. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya pada aktivitas rumah tangga dan pemerintah.

Penelitian Yasa dan Arka (2015), menjelaskan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali tahun 2001-2012. Pada penelitian ini hubungan antara kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi berhubungan secara tidak langsung melalui disparitas pendapatan antardaerah yang merupakan variabel mediasi pada penelitian tersebut. Hasil penelitian Yasa dan Arka sesuai dengan pernyataan menurut Rimawan dan Aryani (2009) bahwa pertumbuhan ekonomi ialah upaya meningkatkan kapasitas produksi suatu ekonomi demi mewujudkan peningkatan pendapatan nasional. Teori tersebut dapat diartikan bahwa dengan adanya usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Berdasar hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian lain yang memperkuat hipotesis peneliti yaitu Mirza (2012) dan Mangala (2019) yang menunjukkan hasil yang sama yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut penelitian tersebut pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

H2 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2018

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *nonrandom sampling* dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel penelitian diambil berdasarkan batasan-batasan yang telah ditetapkan berdasar pertimbangan tertentu untuk tujuan tertentu. Pengambilan sampel menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Sampel harus berasal dari kabupaten di Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT.
2. Data yang digunakan harus lengkap untuk tiap variabelnya.
3. Laporan per tahun masing-masing kabupaten 2015-2018.

Sampel pada penelitian ini adalah kabupaten di Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT yang memiliki data kesejahteraan masyarakat, dana desa, dan pertumbuhan ekonomi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sampel yang terpilih dan sesuai kriteria sebanyak 121 kabupaten dari kurun waktu 2015-2018.

Data Penelitian

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data deskriptif berupa data jumlah data jumlah alokasi dana desa, data jumlah laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, dan data Indeks Kesejahteraan Masyarakat pada kabupaten di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur tahun 2015 sampai dengan 2018. Penelitian ini memilih sumber data sekunder dengan sifat data kuantitatif. Data sekunder didapatkan dari akses data *website* resmi Badan Pusat Statistik Indonesia. Data-data yang didapatkan bersifat kuantitatif yang artinya data tersebut berupa angka-angka.

Variabel Independen

Variabel independen (X) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dapat disebut juga variabel bebas. Variabel independen/bebas pada penelitian ini:

1. Dana desa (X_1), pada 121 kabupaten di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT tahun 2015-2018. Dana desa dihitung menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formulasi + Alokasi Afirmasi

2. Pertumbuhan ekonomi (X_2), pada 121 kabupaten di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT tahun 2015-2018. Pertumbuhan ekonomi dihitung menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

PDRB = Produk domestik regional bruto tahun terkait

PDRB-1 = Produk domestik regional bruto tahun sebelumnya

Variabel Dependen

Variabel dependen (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi variabel lain. Variabel dependen dapat disebut juga variabel terikat. Variabel dependen/terikat pada penelitian ini yaitu kesejahteraan masyarakat pada 121 kabupaten di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT tahun 2015-2018. Kesejahteraan Masyarakat dihitung menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3} (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

Keterangan:

X_1 : angka harapan hidup

X_2 : tingkat pendidikan

X_3 : standar hidup layak

Model Penelitian

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Analisis pada penelitian ini telah ditetapkan peneliti menggunakan analisis regresi berganda. Persamaan regresi merupakan model untuk menggambarkan hubungan matematis antara variabel independen dan variabel dependen (Algifari, 2016:206). Regresi berganda merupakan alat analisis statistik untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen yang diteliti. Regresi berganda digunakan pada penelitian ini karena peneliti menggunakan dua variabel independen maka peneliti menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hubungan antar variabel independen dan dependen digambarkan dengan persamaan:

$$KM = \alpha + \beta_1 DD + \beta_2 PE + \varepsilon$$

KM = Kesejahteraan masyarakat

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel dana desa

β_2 = Koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi

DD = Dana desa

PE = Pertumbuhan ekonomi

ε = Error

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Pengolahan data untuk menganalisis pengaruh dana desa dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan program SPSS versi 15 dan *microsoft excel* untuk pengumpulan dan pengolahan datanya. Data-data penelitian tersusun atas anggaran dana desa per kabupaten tiap tahun, pertumbuhan ekonomi berdasar PDRB kabupaten tiap tahun, dan kesejahteraan masyarakat berdasar IPM kabupaten tiap tahun. Data-data yang diperoleh dari *website* resmi BPS disusun ke *microsoft excel* dan SPSS versi 15 agar data diolah dan dianalisis sehingga penelitian tetap terarah.

Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif untuk memperlihatkan data yang akan dideskripsikan dan memberikan gambaran secara objektif mengenai kondisi data dengan menunjukkan perbandingan pada nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi. Berdasar sampel yang telah digunakan, hasil statistik deskriptif tersebut mendapat hasil sebagai berikut:

Tabel 1.1
Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Dana Desa (DD)	Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Kesejahteraan Masyarakat (KM)
Jumlah Data	484	484	484
Minimum	12.024.877.000,00	-34,08	53,28
Maksimum	402.984.941.000,00	107,07	83,42
Rata-rata	146.418.124.964,8759	5,4403	67,322

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Standar Deviasi	88.009.689.537,69790	5,33216	4,685
-----------------	----------------------	---------	-------

Sumber: Pegolahan data menggunakan SPSS versi 15

Berdasar hasil pengujian pada Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa variabel dana desa (DD) di kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur memiliki nilai rata-rata sebesar Rp146.418.124.964.964,8759 dan standar deviasi hasil dari hasil statistik nilai sebesar Rp88.009.689.537,69790 dengan nilai minimum sebesar Rp12.024.877.000,00 dimiliki oleh Kabupaten Lombok Utara tahun 2015, sedangkan nilai maksimum sebesar Rp402.984.941.000,00 dimiliki oleh Kabupaten Bogor tahun 2018.

Berdasar hasil pengujian pada Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (PE) di kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur memiliki nilai rata-rata sebesar 5,4403% dan standar deviasi hasil dari hasil statistik nilai sebesar 5,33216 dengan nilai minimum sebesar -34,08% dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi NTB pada tahun 2018, sedangkan nilai maksimum sebesar 107,07% dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi NTB pada tahun 2018.

Berdasar hasil pengujian pada Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa variabel kesejahteraan masyarakat (KM) di kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur memiliki nilai rata-rata sebesar 67,322% dan standar deviasi hasil dari hasil statistik nilai sebesar 4,685 dengan nilai minimum sebesar 53,28% dimiliki oleh Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi NTT pada tahun 2015, sedangkan nilai maksimum sebesar 83,42% dimiliki oleh Kabupaten Sleman di Provinsi DIY pada tahun 2018.

Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan terdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi 0,05 dan pengujian pada 2 arah. Hasil uji normalitas yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 1.2
Hasil Uji Normalitas

Jumlah data	484
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	0,959
<i>Asymp.Sig (2-tailed)</i>	0,317

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 15

Berdasar hasil pengujian yang telah dilakukan pada Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* 0,317 > nilai signifikansi 0,05 artinya data terdistribusi normal, sehingga data memenuhi persyaratan uji normalitas.

Uji Multikolinearitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui suatu keadaan dalam model regresi terdapat tidaknya korelasi di antara variabel independen. Hasil uji multikolinearitas yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 1.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Hasil
DD	1,000	1,000	Tidak terdapat masalah multikolinearitas
PE	1,000	1,000	Tidak terdapat masalah multikolinearitas

Sumber: Pengolahan data menggunakan SPSS versi 15

Berdasar hasil pengujian yang telah dilakukan pada Tabel 1.3 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* pada kedua variabel yaitu 1,000 dan VIF pada kedua variabel 1,000. Hasil tersebut artinya kedua variabel tidak mengalami masalah multikolinearitas karena kedua variabel memperoleh nilai *tolerance* 1,000 lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF 1,000 lebih kecil dari 10,00.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan pada varian dalam model regresi. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Hasil uji heteroskedastisitas yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 1.4
Hasil Uji Heroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Hasil
DD	0,103	Tidak terdapat heteroskedastisitas
PE	0,801	Tidak terdapat heteroskedastisitas

Sumber: Pengolahan data menggunakan SPSS versi 15

Berdasar hasil pengujian yang telah dilakukan pada Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa nilai signifikansi pada variabel dana desa (DD) memperoleh nilai sebesar 0,103 dan variabel pertumbuhan ekonomi (PE) memperoleh nilai sebesar 0,801 artinya kedua nilai signifikansi variabel tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi untuk mengetahui apakah terdapat atau tidak korelasi di antara variabel kesalahan pengganggu dengan perubahan waktu pada periode yang ditentukan dengan periode sebelumnya. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji. Hasil uji autokorelasi yang diperoleh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil Uji Autokorelasi

Jumlah data	484
DW	2,100
dL	1,84177
dU	1,85851
4-dL	2,15823
4-dU	2,14149
Hasil	Tidak terdapat masalah autokorelasi

Sumber: Pengolahan data menggunakan SPSS versi 15

Berdasar hasil pengujian yang telah dilakukan pada Tabel 1.5 menunjukkan bahwa nilai *durbin watson* sebesar 2,100. Hasil dL dan dU diperoleh dari tabel *durbin watson* dengan tingkat signifikansi 0,05, jumlah variabel 3 ($k=3$), dan jumlah sampel 484 ($t=481$). Dengan syarat tersebut didapatkan hasil dL sebesar 1,84177, dU sebesar 1,85851, 4-dL sebesar 2,15823, dan 4-dU sebesar 2,14149, maka dapat diartikan bahwa model regresi yang digunakan tidak ditemukan masalah autokorelasi.

Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan uji regresi berganda dalam pengujian hipotesis. Analisis tersebut digunakan dikarenakan dalam penelitian menggunakan dua variabel independen yaitu dana desa dan pertumbuhan ekonomi untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap variabel independen yaitu kesejahteraan masyarakat. Hasil yang diperoleh melalui pengujian hipotesis berdasar uji regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 1.6
Hasil Uji Hipotesis
Uji Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Standard Error
Intercept	1,634004134	0,048491278
DD	0,015352013	0,004306153
PE	0,032194413	0,008302226

Sumber: Pengolahan data menggunakan *microsoft excel*

Berdasar hasil pengujian pada Tabel 1.6, maka dapat dirumuskan dalam persamaan regresi berganda yang digunakan sebagai berikut:

$$KM = 1,634004134 + 0,015352013 + 0,032194413 + \varepsilon$$

Hasil persamaan regresi berganda tersebut menjelaskan nilai *intercept* sebesar 1,634004134 yang memiliki arti bahwa variabel dana desa (DD) dan pertumbuhan ekonomi (PE) jika bernilai 0 atau tidak terdapat peningkatan atau penurunan, maka kesejahteraan masyarakat (KM) bernilai 1,634004134. Nilai koefisien regresi dana desa (DD) sebesar 0,015352013 bertanda positif

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

memperlihatkan bahwa apabila dana desa (DD) meningkat sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan juga sebesar 0,015352013 pada kesejahteraan masyarakat (KM). Nilai koefisien regresi pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 0,032194413 bertanda positif memperlihatkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi (PE) meningkat sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan juga sebesar 0,032194413 pada kesejahteraan masyarakat (KM).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur besar keterikatan pada variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan nilai koefisien determinasi dapat diukur menggunakan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil yang diperoleh melalui uji koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut:

Tabel 1.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Jumlah Data	Multiple R	R Square	Adjusted R Square	Standard Error
484	0,225948336	0,051052651	0,047106923	0,029379662

Sumber: Pengolahan data menggunakan *microsoft excel*

Berdasar hasil hasil pengujian pada Tabel 1.7 memperlihatkan nilai adjusted R^2 sebesar 0,047106923 atau 4,7106923%. Hasil tersebut memiliki arti bahwa variabel independen yaitu dana desa dan pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat sebesar 4,7106923%, sedangkan sisa hasil sebesar 95,2893077% dapat dijelaskan dengan variabel lain diluar penelitian.

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan nilai t-tabel dengan kriteria $df=480$ dan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hasil yang diperoleh melalui uji parsial ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.8
Hasil Uji Parsial

No	Hipotesis	Koefisien Regresi	t Hitung	Probabilitas Signifikansi	Prediksi	Temuan
1	Dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara	0,015352013	3,56874082	0,00040001	Positif	Mendukung

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Barat, dan Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2018					
2	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2018	0,032194413	3,840013985	0,000120059	Positif	Mendukung

Sumber: Pengolahan data menggunakan *microsoft excel*

Berdasar hasil pengujian pada Tabel 1.8 memperlihatkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis pertama yang telah ditemukan berdasar penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh positif dan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil pengujian hipotesis yang pertama memperoleh hasil bahwa dana desa memiliki koefisien regresi sebesar 0,015352013 dan t-hitung sebesar 3,565133892 serta nilai melebihi t-tabel 1,964908164 dengan nilai signifikansi 0,00040001 yang artinya tidak melebihi batas 0,05. Hasil ini memiliki arti variabel dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Hasil pengujian hipotesis yang kedua memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil pengujian hipotesis yang kedua memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien regresi sebesar 0,032194413 dan t-hitung sebesar 3,877804703 serta nilai melebihi t-tabel 1,964908164 dengan nilai signifikan 0,000120059 yang artinya tidak melebihi batas 0,05. Hasil ini memiliki arti variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Uji F

Uji F disebut juga dengan uji simultan merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai tabel distribusi F dengan tingkat signifikansi 5% sebesar 3,014467805. Nilai F-hitung sebesar 12,93871831. F-hitung > F-tabel

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

artinya semua variabel independen yaitu dana desa dan pertumbuhan ekonomi bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasar hasil pengujian yang telah diperoleh peneliti, dapat diketahui bahwa variabel dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kesimpulan tersebut dapat dilihat berdasar hasil pengujian hipotesis dengan hasil yang diperoleh t-hitung sebesar 3,565133892 yang artinya telah melebihi t-tabel sebesar 1,964908164 dengan nilai signifikansi 0,00040001 yang artinya tidak melebihi batas 0,05. Berdasar hasil pengujian ini keputusan pada hipotesis pertama diterima. Berdasar dari hasil pengujian tersebut maka dapat diartikan bahwa dana desa yang telah dilaksanakan pemerintah telah dijalankan sesuai prosedur dan berjalan secara optimal dalam rangka usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori menurut Badrudin (2015), yang menjelaskan rasio aktivitas memperlihatkan pola belanja daerah menggunakan dana anggaran untuk belanja memiliki hubungan dengan usaha meningkatkan perekonomian daerah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan Manggala (2019), Rimawan dan Aryani (2019), dan Sunu dan Utama (2019) yang menjelaskan bahwa dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sunu dan Utama (2019) menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan memediasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat artinya semakin besar dana desa maka kesejahteraan masyarakat meningkat menyebabkan tingkat kemiskinan turun. Rimawan dan Aryani (2019) menyebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat meningkat seiring peningkatan sarana pendidikan, infratraktur, dan layanan kesehatan yang ada di desa. Manggala (2019) menyebutkan bahwa dana desa dapat berhasil bila berjalan sesuai ketentuan peraturan, transparan, dan bertanggung jawab serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasar hasil pengujian yang telah diperoleh peneliti, dapat diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kesimpulan tersebut dapat dilihat berdasar hasil pengujian hipotesis dengan hasil yang diperoleh t-hitung 3,877804703 sebesar yang artinya telah melebihi t-tabel sebesar 1,964908164 dengan nilai signifikansi 0,000120059 yang artinya tidak melebihi batas 0,05. Berdasar hasil pengujian ini keputusan pada hipotesis kedua diterima. Berdasar dari hasil pengujian tersebut maka dapat diartikan bahwa usaha dalam menjalankan pertumbuhan ekonomi yang telah dilaksanakan pemerintah berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori menurut Baeti (2013), pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan usaha meningkatkan produksi barang dan jasa dalam

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga makin tinggi produksi barang dan jasa maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia. Hasil tersebut pun didukung oleh penelitian yang dilakukan Baeti (2019), Yara dan Arka dan Arka (2015), Mirza (2012), dan Manggala (2019) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baeti (2013), menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya pada aktifitas rumah tangga dan pemerintah. Yasa dan Arka (2015) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat tidak terlepas dari pembangunan yang dilakukan, khususnya sarana publik untuk jalannya perekonomian. Mirza (2019), menyebutkan peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan berubahnya pola konsumsi dan meningkatnya pertumbuhan output per kapita sehingga daya beli masyarakat meningkat. Manggala (2019) menyebutkan meningkatnya aktifitas ekonomi menandakan adanya perkembangan kegiatan ekonomi sehingga meningkatkan mutu manusia.

Kesimpulan

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan meneliti pengaruh dari dana desa dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat selama 4 tahun yaitu periode waktu 2015-2018 di kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Berdasar hasil yang telah penulis uji sebelumnya, disimpulkan hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur pada periode 2015-2018. Hasil tersebut didapatkan berdasar uji parsial (uji t) dengan hasil yang diperoleh t-hitung sebesar 3.565133892 yang artinya telah melebihi t-tabel sebesar 1,964908164 dengan nilai signifikansi 0.00040001 yang artinya tidak melebihi batas 0,05. Hasil tersebut dapat artikan bahwa dana desa yang dijalankan dengan baik sehingga menciptakan kehidupan sejahtera pada masyarakat kabupaten.
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur pada periode 2015-2018. Hasil tersebut didapatkan berdasar uji parsial (uji t) dengan hasil diperoleh t-hitung 3.877804703 sebesar yang artinya telah melebihi t-tabel sebesar 1,964908164 dengan nilai signifikansi 0.000120059 yang artinya tidak melebihi batas 0,05. Hasil tersebut dapat diartikan usaha pemerintah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang telah diusahakan.
3. Variabel independen yaitu dana desa dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015-2018 bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kesejahteraan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penelitian ini meneliti sebanyak 121 kabupaten di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur pada periode tahun 2015-2018. Hasil penelitian ini hanya dapat diimplementasi mencakup wilayah yang diteliti, bukan gambaran seluruh wilayah Indonesia. Mengelola dana desa dan usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi secara efektif dan transparan tentunya membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk menjalankan pengelolaannya. Kinerja instansi pemerintah tiap daerah tentunya berbeda (Putry dan Badrudin, 2017). Berdasar penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini bukanlah gambaran keseluruhan wilayah Indonesia karena adanya perbedaan kemampuan SDM tiap daerah dan tiap instansi pemerintahan.

Saran

Berdasar penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti bermaksud menyampaikan saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan. Saran tersebut antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah daerah kabupaten Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur disarankan dapat meningkatkan kinerja agar terciptanya kesejahteraan yang meningkat dan berkelanjutan.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan model yang sama namun membandingkan wilayah yang berbeda atau dapat menambah dan/atau mengganti variabel, periode, dan jumlah kabupaten yang digunakan dalam rangka menguji pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Variabel independen pada penelitian ini yaitu dana desa dan pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat sebesar 4,7106923%, sedangkan sisa hasil sebesar 95,2893077% dapat dijelaskan dengan variabel lain diluar penelitian artinya masih ada variabel lain yang dapat menjelaskan variabel kesejahteraan masyarakat. Data waktu pada penelitian ini selama 4 tahun pada periode 2015-2018, sehingga untuk penelitian berikutnya dapat meningkatkan periode penelitian dan/atau mengganti periode waktu yang diteliti untuk melihat perkembangan tiap periode waktu. Jumlah wilayah juga dapat ditambah dan/atau diganti untuk dapat membahas yang berbeda dari penelitian ini. Peneliti juga berharap peneliti berikutnya mendapat referensi jurnal yang maksimal untuk memperkuat topik.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Amiyati, N., & Bawono, A. D. B. Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) terhadap Pengalokasian Belanja Pendidikan. In *Seminar Nasional dan The 5th Call for Syariah Paper, Surakarta*.
- Arka, S., & Yasa, I. K. O. A. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 44328.
- Aryani, F. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia serta Kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(3), 287-295.
- Badrudin, R. (2015). Evaluation of the Specific Allocation Fund for Indonesian Society Welfare. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 13(7), 5609-5626
- Badrudin, R., & Siregar, B. (2015). The Evaluation of the Implementation of Regional Autonomy in Indonesia. *Economic Journal of Emergin Markets*, 7(1), 1-11.
- Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3).
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(1), 14-25.
- Kusreni, S. (2009). Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Spesialisasi Sektoral dan Wilayah Serta Struktur Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral untuk Daerah Perkotaan di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga (JEBA)*, 19(1).
- Mangala, G. D. (2019). Pengaruh Dana Desa (DD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *JEBSIS-JURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, 1(1), 1-7.
- Manek, M., & Badrudin, R. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 17(2), 81-98.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2).

Putra, H. S. (2018). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan di ACEH. *Jurnal Analis Kebijakan*, 2(2).

Putry, N. A. C., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Opini Audit dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 12(1), 25-34.

Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1).

Siregar, B., & Badrudin, R. (2019). The Evaluation of Fiscal Decentralization in Indonesia Based on the Degree of Regional Autonomy. *Journal of Reviews on Global Economics*, 8, 611-624.

Sunu, M. K. K., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(8), 843-872.

Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Indrawati, S. M. (2017). *Buku Pintar Dana Desa; Dana desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Subiyakto, H., & Algifari. (2011). *Praktikum Statistika dengan Microsoft Excel dan SPSS*. Yogyakarta: STIE YKPN.

Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<http://www.bps.go.id/> Diakses 9 Februari 2020

<http://www.kemenu.go.id/> Diakses 9 Februari 2020

<https://www.spssindonesia.com/> Diakses 20 Mei 2020